

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
KOTA SURAKARTA**

(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)



**Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

GALIH SARAS SEKARWANGI

B 200 160 008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**"DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
KOTA SURAKARTA
(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)"**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

GALIH SARAS SEKARWANGI

B 200 160 008

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Dra. Mujiyati, M.Si)

NIDN. 0610056605

HALAMAN PENGESAHAN

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
KOTA SURAKARTA
(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)**

Oleh :

GALIH SARAS SEKARWANGI
B 200 160 008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan penguji:

1. Dra. Mujiyati, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Shinta Permata Sari, S.E., M.M.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Erma Setiawati, M.M., Ak.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Syamsudin, MM
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis



Galih Saras Sekarwangi
B 200 160 008

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
KOTA SURAKARTA
(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang membayar pajak di mana pengambilan sampel menggunakan metode sampling insidental, dengan total sampel 99 responden. Teknik analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,043; 0,034; 0,024; dan 0,048. Sementara itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan nilai sig sebesar 0,535.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Abstract

This study aims to examine the effect of understanding taxation regulations, tax knowledge, tax sanctions, service quality and modernization of the tax administration system to the tax compliance of MSME individuals who are registered at the Pratama Tax Office in Surakarta. The method used in this study is a quantitative method. Respondents in this study are MSME private taxpayers where sampling uses the incidental sampling method, with a total sample of 99 respondents. Data analysis techniques use multiple linear regression models. The results of this study indicate that understanding tax regulations, tax knowledge, tax sanctions, and service quality affect the tax compliance of MSME private individuals with a sig value of 0.043 each; 0.034; 0.024; and 0.048. Meanwhile, the modernization of the tax administration system does not affect the compliance of tax payers of MSME individuals with a sig value of 0.535.

Keywords: MSME personal taxpayer compliance, understanding of tax regulations, tax knowledge, tax sanctions, service quality, modernization of tax administration systems.

1. PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia mengambil peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional, dana yang digunakan untuk pembangunan nasional sebagian besar didapatkan dari pajak negara, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 menganggarkan

pendapatan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah, nilai tersebut adalah 82,5% dari pendapatan nasional dimana 378,3 triliun atau sebesar 17,5% didapatkan dari pendapatan negara bukan pajak, dan 0,4 triliun atau sebesar 0,02% didapatkan dari pendapatan hibah dari angka tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan pajak sangatlah berperan penting dalam menopang APBN, sehingga peran perpajakan sangatlah penting. Untuk itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan pemerintah, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama sektor UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, dengan disiplin dan tepat waktu, serta dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (tanpa paksaan), menurut Nurmantu (2003: 148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal tersebut beberapa diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat dua dimensi wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu yang pertama pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. dan pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan yang kedua pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sedangkan menurut Fermatasari (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diharapkan akan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak serta ketaatan wajib pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku Mardiasmo (2013:59).

Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan penetapan sanksi bagi wajib pajak apabila melanggar peraturan yang ada, menurut Mardiasmo (2013:59) bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dengan demikian adanya sanksi akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas layanan dan modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2007:50) adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang dipersepsikan (*perceived service*) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (*expected service*). Tetapi arti mutu tidak hanya memuaskan pelanggan tetapi juga dapat menyenangkan pelanggan, inovasi ke pelanggan, dan membuat pelanggan lebih inovatif, sedangkan menurut Candra et al. (2013) modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan sendiri pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir, perilaku aparat, dan tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Dengan adanya peningkatan layanan dan modernisasi administrasi diharapkan akan membuat birokrasi semakin transparan dan meningkatkan minat wajib pajak dalam melakukan pelunasan kewajibannya.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik untuk menyimpulkan hipotesis dengan menggunakan hubungan kausal (*Causal Hypothesis*). Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat, terdapat variabel independen (yang mempengaruhi) dan dependen (yang dipengaruhi). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan berupa pembagian kuesioner kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

2.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang menggunakan skema pembayaran PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

2.3 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

2.4 Variabel Dependen

Yang dimaksud Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y) dalam penelitian ini adalah sejauh mana Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.5 Variabel Independen

2.5.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pajak dalam peraturan perpajakan.

2.5.2 Pengetahuan Perpajakan

Dalam penelitian ini merupakan kemampuan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pengisian SPT yang akan dibayar hingga manfaat pajak yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

2.5.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan preventif atau pencegahan agar supaya Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan dan bersifat tegas serta tidak membedakan antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lainnya.

2.5.4 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh fiskus terkait dengan profesional dalam memberikan pelayanan untuk Wajib Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2.5.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perkembangan teknologi dengan menerapkan sistem berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Billing* dapat memudahkan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \quad (1)$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Pemahaman Peraturan Perpajakan

X₂ = Pengetahuan Perpajakan

X₃ = Sanksi Perpajakan

X₄ = Kualitas Pelayanan

X₅ = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

e = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Kualitas Data

3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52).

Teknik korelasi yang digunakan dalam melakukan uji validitas adalah dengan metode *Pearson Correlation*. Jika rhitung lebih besar dari rtabel, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011: 53). Pengujian validitas tiap item pernyataan dilakukan dengan menghitung korelasi *product moment pearson* antara skor item dan skor total. Hasil uji validitas angket dengan menggunakan SPSS 21. dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
KWP1	0,867	0,1975	Valid
KWP2	0,891	0,1975	Valid
KWP3	0,910	0,1975	Valid
KWP4	0,934	0,1975	Valid
KWP5	0,939	0,1975	Valid
KWP6	0,916	0,1975	Valid

Sumber : Data Olah SPSS, 2020

Tabel 1 menunjukkan semua butir pernyataan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian butir-butir pernyataan dalam variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Indikator	r Hitung	r Tabel	Keterangan
PEM1	0,897	0,1975	Valid
PEM2	0,916	0,1975	Valid
PEM3	0,930	0,1975	Valid
PEM4	0,910	0,1975	Valid
PEM5	0,909	0,1975	Valid
PEM6	0,912	0,1975	Valid

Sumber : Data Olah SPSS, 2020

Tabel 2 menunjukkan semua butir pernyataan pemahaman peraturan perpajakan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian butir-butir pernyataan dalam variabel pemahaman peraturan perpajakan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
PEN1	0,888	0,1975	Valid
PEN2	0,889	0,1975	Valid
PEN3	0,934	0,1975	Valid
PEN4	0,917	0,1975	Valid
PEN5	0,919	0,1975	Valid
PEN6	0,937	0,1975	Valid
PEN7	0,899	0,1975	Valid

Sumber : Data Olah SPSS, 2020

Tabel 3 menunjukkan semua butir pernyataan pengetahuan perpajakan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian butir-butir pernyataan dalam variabel pengetahuan perpajakan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Indikator	r hitung	r table	Keterangan
SAN1	0,917	0,1975	Valid
SAN2	0,939	0,1975	Valid
SAN3	0,897	0,1975	Valid
SAN4	0,936	0,1975	Valid
SAN5	0,933	0,1975	Valid
SAN6	0,918	0,1975	Valid
SAN7	0,931	0,1975	Valid

Sumber : Data Olah SPSS, 2020

Tabel 4 menunjukkan semua butir pernyataan sanksi perpajakan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai rtabel. Dengan demikian butir-butir pernyataan dalam variabel sanksi perpajakan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Indikator	r hitung	r table	Keterangan
KUA1	0,938	0,1975	Valid
KUA2	0,936	0,1975	Valid
KUA3	0,925	0,1975	Valid
KUA4	0,920	0,1975	Valid
KUA5	0,926	0,1975	Valid
KUA6	0,904	0,1975	Valid
KUA7	0,890	0,1975	Valid

Sumber : Data Olah SPSS, 2020

Tabel 5 menunjukkan semua butir pernyataan kualitas pelayanan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai rtabel. Dengan demikian butir-butir pernyataan dalam variabel kualitas pelayanan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
MOD1	0,914	0,1975	Valid
MOD2	0,958	0,1975	Valid
MOD3	0,955	0,1975	Valid
MOD4	0,957	0,1975	Valid
MOD5	0,941	0,1975	Valid
MOD6	0,918	0,1975	Valid

Sumber : Data Olah, 2020

Tabel 6 menunjukkan semua butir pernyataan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai rtabel. Dengan demikian butir-butir pernyataan dalam variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan layak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011: 47). Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien Cronbach's Alpha. Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	0,958	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,960	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,966	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,972	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,969	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,974	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan Cronbach's Alpha sebagaimana terlihat pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha instrumen variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan di atas 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Maka dari itu sebelum dimasukkan kedalam model regresi berganda harus dilakukan uji asumsi klasik yaitu : Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2005: 76). Untuk mendeteksi normalitas ialah dengan melakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria pengujian yang digunakan adalah melalui nilai Asymp. Sig. (2-tailed), apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > level of significant, yaitu 5%, maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal, dan apabila jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 5%, maka dapat dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,715
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,686
Keterangan	Normal

Sumber : Data Hasil Olah, 2020

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,715 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,686. Nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model regresi terdistribusi normal.

3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009: 95). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Uji multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian bebas dari multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas Data

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,158	6,349	Bebas Multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0,152	6,596	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,260	3,852	Bebas Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	0,318	3,147	Bebas Multikolinieritas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,377	2,652	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa masing-masing nilai *VIF* < 10, demikian juga hasil nilai *tolerance* > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.

3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian uji heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser*.

Tabel 10. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	T	Sig	Kesimpulan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,260	0,795	Bebas Heterokedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	-0,469	0,640	Bebas Heterokedastisitas
Sanksi Perpajakan	-0,560	0,577	Bebas Heterokedastisitas
Kualitas Pelayanan	-0,452	0,672	Bebas Heterokedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,514	0,609	Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Hasil olah data, 2020

Dari hasil uji diatas dapat diketahui bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada $p\text{-value} > 0.05$. jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer SPSS versi 21 di dapatkan persamaan regresi.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig
Konstanta	5,584	4,453	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,248	2,055	0,043
Pengetahuan Perpajakan	0,213	2,156	0,034
Sanksi Perpajakan	0,158	2,299	0,024
Kualitas Pelayanan	0,143	2,002	0,048
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-0,044	-0,622	0,535

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Dari hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan secara statistic adalah sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 5,584 + 0,248 \text{ PEM} + 0,213 \text{ PEN} + 0,158 \text{ SAN} + 0,143 \text{ KUA} - 0,044 \text{ MOD} + \varepsilon \quad (2)$$

- Nilai konstanta bernilai positif sebesar 5,584 menunjukkan bahwa jika variabel pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diasumsikan

konstan atau sama dengan nol maka besarnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 5,584.

- b. Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,248. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan menurun.
- c. Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,213. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan menurun.
- d. Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,158. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan menurun.
- e. Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,143. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kualitas pelayanan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan menurun.
- f. Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar -0,044. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan meningkat.

3.4 Hasil Uji Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Uji t Hipotesis

Variabel	T_{Hitung}	Sig	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	2,055	0,043	H ₁ diterima
Pengetahuan Perpajakan	2,156	0,034	H ₂ diterima
Sanksi Perpajakan	2,299	0,024	H ₃ diterima
Kualitas Pelayanan	2,002	0,048	H ₄ diterima
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-0,622	0,535	H ₅ ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2020

3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS versi 21, dapat diketahui bahwa memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini berarti model regresi dinyatakan fit (fit of goodness). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari semua variabel meliputi pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel terikat. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²*.

Tabel I3. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.747	.733	2,237

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan uji diatas untuk menilai koefisien determinasi dalam analisisregresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,733. Hal ini berarti bahwa 73,30% variasi variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya yaitu sebesar 26,70 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model (variabel) yang diteliti.

3.5 Pembahasan

3.5.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai t hitung > t tabel sebesar $2,055 > 1,98422$ dan nilai signifikan sebesar $0,043 < 5\%$, sehingga H1 gagal menolak hipotesis pertama yang artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang peneliti lakukan sebagai objek penelitian.

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan akan sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak informasi yang diperoleh wajib pajak maka akan membantu mereka untuk dapat memberikan tanggapan. Sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman dan informasi wajib pajak tersebut tidak akan merespon tanggapan dari permasalahan yang ada. Tetapi informasi yang tersebar di media massa tidak semuanya bisa dipertanggung jawabkan, oleh sebab itu tidak sedikit wajib pajak yang terpengaruh persepsi negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Jadi dapat disimpulkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian hal ini dapat terbukti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati (2018) yang dapat memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai t hitung > t tabel kemudahan membayar pajak sebesar $2,156 > 1,98422$ dan nilai signifikan sebesar $0,034 < 5\%$, sehingga H2 gagal menolak hipotesis kedua yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang peneliti lakukan sebagai objek penelitian.

Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan perananan pajak serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak akan dapat memudahkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al. (2017) dan Aini Nur dan Fidiana (2017) bahwa yang dapat memberikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi ini terus digencarkan oleh fiskus maka akan memberikan dampak positif terutama bagi Wajib Pajak UMKM, hal ini akan menambah kepatuhan mereka dalam membayar pajak

3.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang peneliti jadikan objek penelitian. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar $2,299 > 1,98422$ dan nilai signifikan sebesar $0,024 < 5\%$, sehingga H_3 gagal menolak hipotesis ketiga yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian As'ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati (2018) dan Aini Nur dan Fidiana (2017).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pencegah untuk melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sanksi administrasi yang meliputi denda administrasi, bunga dan kenaikan. Selain sanksi administrasi ada pula sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu, tidak mengisi SPT secara jujur dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Hasil ini tidak didukung penelitian Sarasawati et al. (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai t hitung > ttabel sebesar 2,002 > 1,98422 dan nilai signifikan sebesar 0,048 < 5%, sehingga H4 gagal menolak hipotesis keempat yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang peneliti lakukan sebagai objek penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suwito Edy (2017).

Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak. Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup luas, formulir pajak yang tersedia secara lengkap membuat wajib pajak merasa nyaman saat berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, petugas pajak memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak, serta petugas pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak didukung oleh penelitian As'ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.5.5 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai t hitung > ttabel sebesar -0,622 < -1,98422 dan nilai signifikan sebesar 0,535 > 5%, sehingga H5 menolak hipotesis kelima yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan semakin menurun kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang peneliti lakukan sebagai objek penelitian. Hal ini sejalan dengan penelitian Sarasawati et al. (2018).

Sistem perpajakan yang sudah diberikan KPP Pratama Surakarta belum menampakkan hasil yang baik terhadap peningkatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kemudahan membayar pajak seperti pembayaran pajak dengan menggunakan ATM dan e-banking, pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT, pelaporan pajak menggunakan e-filling, pendaftaran NPWP dengan sistem online belum dapat mempengaruhi wajib pajak untuk dapat melaporkan dan membayarkan pajak tepat pada waktunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Surakarta harus lebih di sosialisasikan lagi kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini Nur dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengambil sampel 99 yang merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, dapat ditarik kesimpulan :

- a. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga **H₁ diterima**.
- b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga **H₂ diterima**.
- c. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga **H₃ diterima**.

- d. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga **H₄ diterima**.
- e. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga **H₅ ditolak**.

4.2 Keterbatasan

- a. Dalam penelitian ini subyek penelitian hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dimana cakupannya masih sangat sedikit dan sempit sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai suatu standart data patokan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM diseluruh KPP yang ada di Solo Raya dimana cakupannya luas.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel meliputi pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini.

4.3 Saran

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subyek penelitian. Misalnya Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di seluruh KPP se-Solo Raya dimana cakupannya lebih luas.
- b. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan dapat menggali variabel – variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel – variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dimana hal ini akan menambah kualitas penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. *“Teori Akuntansi”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Aini, Nur. 2017 *“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”*.

- Alfiah, Irma. 2014. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPKAD Purwodadi*. Universitas Muria Kudus.
- Chandra, Ricki, Wibisono, Haris dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 1 (1): 40.
- Ella Widyastuti. 2015 “PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”.
- Etivitawati et al. 2017 “PENGARUH PEMAHAMAN, PENGETAHUAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI”.
- Farid Kurniawan. 2015 “PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KECENDERUNGAN NEGOSIASI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Sukoharjo)”.
- Fermatasari, D. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Universitas Komputer Indonesia. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl-dewifermat-32169-12-dewifer-l.pdf>. 5 November 2016.
- Ginting et al. 2017. “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado)”.
- Kusuma, Kartika Candra. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Madewing, Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Hasnudin. Makasar.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mintje. 2016 “PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)”.
- Mujiyati, dkk. 2017. *Inti Perpajakan Indonesia*. Surakarta:Muhammadiyah University Press.
- Muslim, afdilla. 2007. *Pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan, pengalaman dan penghasilan wp di kpp padang*. Skripsi FE Unand.

- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang. Sumatra Utara.
- Nurhidayah, Sari. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”. Skripsi, UNY, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pranadata, I Gede Putu. (2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (Vol 2, No. 2: Semester Genap 2013/2014). Hlm. 1-16. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Purnamasari et al. 2015. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No. 1 Januari 2015.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.